BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan adalah sebagai suatu kontrak antara satu atau lebih pihak yang memekerjakan pihak lain untuk melakukan suatu jasa untuk kepentingan mereka yang meliputi pendelegasian beberapa kekuasaan pengambilan keputusan kepada pihak lain tersebut.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi ini menyatakan bahwa adanya pemisahan antara prinsipal dan agen akan memunculkan permasalahan agensi karena pihak-pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalisasikan fungsi utilitasnya masing-masing. Bisa disimpulkan teori ini mengindikasikan bahwa pihak- pihak prinsipal dan agen memiliki kepentingan mereka sendiri dalam menjalankan praktik bisnisnya. Dengan gambaran pihak prinsipal mementingkan hasil keuangan perusahaan atas dasar pengembalian uang investasi di dalam perusahaan, sedangkan pihak agen mementingkan timbal balik seperti kompensasi atau bonus atau tambahan lain yang bisa terjadi dalam hubungan keagenan.

Salah satu konflik keagenan adalah asimetri informasi. Asimetri informasi adalah

situasi saat informasi yang dimiliki oleh pihak agen, yaitu manajemen, sebagai penyedia informasi lebih banyak dibandingkan pihak prinsipal atau pemegang saham sebagai pengguna informasi. Situasi seperti ini menjadi keuntungan tersendiri bagi manajer untuk melakukan tindakan memaksimumkan utilitasnya sesuai keinginan dan kepentingannya. Situasi ini juga akan menimbulkan perbedaan tujuan dan preferensi risiko antara agen dan prinsipal karena prinsipal tidak dapat mengontrol dan tidak pernah tahu secara pasti bagaimana aktualisasi kontribusi pihak agen akibat tidak mencukupinya informasi yang dimiliki pihak prinsipal.

Menurut Scott (2000) terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu :

1. *Adverse selection,* adalah salah satu jenis asimetri informasi yang terjadi karena para manajer serta pihak dalam lainnya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan dengan investor pihak luar atau pemegang saham. Salah satu kemungkinannya adalah informasi mengenai fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tidak disampaikan oleh manajer.
2. *Moral hazard,* adalah jenis selanjutnya asimetri informasi yang terjadi karena kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur. Dalam situasi ini manajer dapat melakukan tindakan yang melanggar kontrak dan secara etika atau norma tidak layak untuk dilakukan atau tindakan manajer yang bekerja kurang optimal untuk pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut Weston dan Brigham (1998), hubungan keagenan terjadi antara:

1. Pemegang saham (pemilik) dan manajer

   Salah satu kemungkinan terjadi masalah keagenan disaat manajer suatu perusahaan memiliki kepemilikan saham biasa kurang dari 100 persen diperusahaan tersebut. Situasi ini menunjukan bahwa manajer tidak bisa mendapatkan semua keuntungan dari usahanya. Lalu selanjutnya adalah masalah yang menyangkut pengambilalihan saham dengan memanfaatkan fasilitas kredit perseroan tersebut atau *laveraged buyout*.

2. Pemegang saham (melalui manajer) dan kreditur

   Masalah keagenan dapat terjadi antara pemegang saham dan kreditur. Kreditur meminjamkan dana dengan melihat faktor-faktor yang menentukan risiko arus kas karena hal tersebut sangat mempengaruhi keamanan utangnya. Faktor-faktor yang dimaksud adalah tingkat risiko dari aktiva perusahaan yang ada, perkiraan atas risiko penambahan aktiva masa depan, struktur modal perusahaan saat ini dan perubahan struktur modal masa depan. Dengan begitu kreditur mendapat kepemilikan sebagian dari arus laba perusahaan sebagai pembayaran bunga dan pokok utang atau bahkan mendapat kepemilikan *asset* jika perusahaan yang bersangkutan bangkrut.

Atas uraian mengenai teori agensi di atas, maka dapat dilihat hubungan antara teori agensi dengan penelitian ini adalah apakah akan digunakan atau tidak prinsip konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan oleh

manajer perusahaan. Dalam hubungan keagenan antara pemilik perusahaan dengan manajer perusahaan dan manajer perusahaan dengan kreditur, kemungkinan besar perusahaan akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan laba atau prosedur yang tidak menerapkan prinsip konservatisme akuntansi.

Tidak diterapkannya prinsip konservatisme akuntansi dikarenakan perhitungan bonus yang akan diperoleh oleh manajer dan pihak dalam lainnya dihitung dari nilai laba yang diperoleh perusahaan. Lalu alasan lainnya adalah untuk menunjukkan kinerja yang baik, dengan begitu perusahaan akan dengan mudah meminjam dana kepada kreditur. Karena pada situasi laba yang tinggi kreditur akan yakin bahwa perusahaan mampu menutup hutang-hutangnya dan beranggapan perusahaan dapat mengurangi tingkat risiko utang tidak dibayarkan.

2.1.2 Konservatisme Akuntansi

Definisi konservatisme menurut Watts (2003) ialah sebagai perbedaan verifiabilitas atau sesuatu yang dapat diuji kembali, yang dimintaa untuk pengakuan laba dibandingkan rugi. Jadi bisa diartikan secara tradisional, konservatisme akuntansi adalah tidak mengantisipasi keuntungan, tetapi megantisipasi semua kerugian. Seperti pendapat Ghozali dan Chariri (2007) yang menyatakan konservatisme ini harus segera mengakui kerugian, biaya atau hutang yang mungkin akan terjadi dan tidak boleh mengakui laba, pendapatan atau aktiva sebelum benar- benar terjadi.

Konservatisme muncul akibat adanya insentif yang berhubungan dengan biaya kontrak atas perjanjian hutang, biaya politis seperti pajak dan sebagainya, serta

bonus atas kinerja manajemen. Seperti pendapat Lara, et al., (2005), konservatisme biasanya didefinisikan sebagai reaksi kehati-hatian (*prudent*) terhadap ketidakpastian, ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan pemegang saham (*shareholders*) dan pemberi pinjaman (*debtholders*) yang menentukan sebuah verifikasi standar yang lebih tinggi untuk mengakui *goodnews* daripada *badnews*.

Konservatisme menjadi keuntungan tersendiri bagi perusaahan karena dapat mengurangi pembayaran kepada pihak-pihak yang bersangkutan, seperti pembayaran pajak dan biaya politik lainnya. Seperti pendapat Suharli (2009) bahwa kaidah pokok konservatisme adalah tidak memperbolehkan mengantisipasi laba sebelum terjadi dan jika akuntan dapat memilih metode akuntansi, setidaknya mereka memilih metode yang dapat menguntungkan bagi perusahaan.

Konservatisme juga dapat menyebabkan pernyataan yang mengecilkan atau *understatement* terhadap nilai laba periode sekarang dan mengarah pada pernyataan yang membesarkan atau *overstatement* terhadap nilai laba periode-periode berikutnya sebagai akibat penundaaan pengakuan laba. Sepeti pendapat Kiryanto dan Supriyanto (2006) yang menyatakan bahwa jika laporan keuangan dibuat atas dasar metode konservatif hasilnya cenderung bias dan tidak mencerminkan keadaan keuangan perusahaan sebenarnya.

Bahkan Bliss (dalam Watts, 2003) menyatakan definisi yang paling ekstrim, bahwa akuntansi konservatisme tidak mengantisipasi laba tetapi mengantisipasi semua kerugian. Begitu juga pendapat Basu (1997) yang menyatakan bahwa akuntansi

konservatisme adalah praktik akuntansi yang mengurangi laba, yang berarti menghapuskan aktiva bersih dalam merespon kabar buruk/*bad news* dan juga tidak meningkat laba, yang berarti meningkatkan aktiva bersih dalam merespon kabar baik/*good news*.

Prinsip Konservatisme dalam laporan keuangan perusahaan merupakan prinsip yang masih kontrovesial sampai saat ini. Ada beberapa pihak yang mendukung diperlukannya prinsip konservatisme dalam akuntansi karena bermanfaat, tetapi ada beberapa pihak juga yang tidak mendukung adanya prinsip konservatisme karena tidak bermanfaat. Berikut ini akan dijelaskan akuntansi konservatisme yang bermanfaat dan tidak bermanfaat:

1. Akuntansi konservatisme bermanfaat

Diperlukannya prinsip konservatisme dalam laporan keuangan perusahaan salah satunya adalah menetralisir optimisme para manajer dalam melaporkan hasil usahanya. Artinya laporan keuangan yang dihasilkan akan bersifat pesimis. Menurut Watts (2003) prinsip konservatisme ini dapat menghindari sikap optimisme para manajer dalam kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media nya. Dengan begitu prinsip konservatisme dapat menghindari sifat *moral hazard* dan praktik manajemen laba oleh manajer dalam perusahaan.

Watts (2003) menyatakan selain untuk membatasi perilaku optimisme manajer, prinsip ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan karena akan membatasi *opportunistic payment* kepada manajer dalam

bentuk bonus dan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain itu manfaat lainnya adalah mengurangi potensi tuntutan hukum (*litigation*) akibat pencatatan laba yang over statement. Dan terakhir menaati peraturan yang dibuat oleh standar akuntansi dalam metode yang dipilih dalam penyusuna laporan keuangan.

Prinsip ini sangat menolong para kreditur, pemegang saham serta calon investor karena hasil laba yang dilaporkan perusahaan merupakan nilai laba minimal. Menurut Almilia (2004), nilai laba dalam laporan keuangan yang disusun menggunakan prinsip konservatisme merupakan laba yang berkualitas karena menunjukan laba minimal atau laba yang nilainya tidak dibesar besarkan.

2. Akuntansi konservatisme tidak bermanfaat

Salah satu kritik yang sering muncul dalam penggunaan akuntansi konservatisme adalah prinsip ini mempengaruhi hasil dari laporan keuangan. Kiryanti dan Supriyanto (2006) menyatakan bahwa jika laporan keuangan dibuat atas dasar metode konservatif hasilnya cenderung bias dan tidak mencerminkan keadaan keuangan perusahaan sebenarnya. Ini dikarenakan prinsip konservatisme yang lebih cepat mengakui kewajiban dan biaya serta lebih lambat mengakui aktiva dan pendapatan.

Menurut Klein dan Marquardt (2000), terdapat dua aspek yang dapat menjadikan konservatisme akuntansi mengurangi kualitas dari laporan keuangan, khususnya dalam hal relevansi. Pertama, konservatisme melaporkan nilai laba dan asset terlalu rendah. Akibatnya akan mempengaruhi kualitas relevansi laporan keuangan

khususnya netralitas. Dan juga adanya akuntansi konservatisme mendorong adanya sikap pesimistik yang akan menjadi masalah ketika melakukan analisis ekuitas. Kedua, konservatisme menerapkan penundaan pengakuan berita baik dan dengan segera mengakui berita buruk. Hal tersebut dapat mengakibatkan *understatement* atas laba yang dilaporkan pada periode saat ini, lalu *overstatement* terhadap laba yang dilaporkan pada periode yang akan datang.

2.1.3 Optimisme

Konservatisme dalam akuntansi menyatakan bahwa, apabila ada beberapa alternatif akuntansi yang seharusnya dipilih adalah alternatif yang paling kecil, kemungkinan untuk melaporkan aset dan pendapatan lebih besar dari yang seharusnya (Almilia, 2005). Berbeda dengan konservatisme, bila menggunakan prinsip optimisme, maka perusahaan akan melaporkan laba cenderung lebih tinggi. Perusahaan yang menggunakan konsep ini biasanya lebih berani dalam mengambil resiko tetapi kurang dapat mengantisipasi ketidak pastian yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Perusahaan dengan kepemilikan sahan yang lebih rendah dari pada kepemilikan pihak eksternal cenderung menggunakan konsep optimisme. Hal tersebut di karnakan manajer ingin agar hasil kerja yang selama ini yang mereka lakukan di anggap baik oleh pihak eksternal, sehingga manajer mendapatkan bonus dengan asumsi terdapat terdapat perjanjian bonus plan sebelumnya sehingga mendorong manajer melaporkan laba lebih besar (Suryana, 2008).

Perusahaan ingin memberikan jaminan laba yang tinggi kepada pemegang saham

eksternal, sehingga pemegang shaam tersebut merasa investasi yang mereka tanamkan ke perusahaan akan menghasilkan dividen yang tinggi pula. Dengan demikian para calon investor juga akan tertarik untuk menanamkan investasi mereka ke perusahaan karena laporan keuangan menyajikan angka laba yang tinggi.

2.1.4 Rasio *Leverage*

Rasio Leverage adalah rasio yang di gunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang di miliki perusahaan berasal dari hutang atau modaal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap pada pihak lain serta keseimbangannilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Menurut Sutrisno (2003) rasio *leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai dengan utang. Apabila perusahaan tidak mempunyai *leverage* atau *leverage* sama dengan nol, hal tersebut menandakan perusahaan sepenuhnya menggunakan modal sendiri tanpa menggunakan utang dalam beroperasi. Dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* adalah perbandingan tingkat hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai asset dengan maksud memperbesar perusahaan perusahaan tersebut.

Rasio *leverage* ini digunakan dalam pengukuran *debt convenant*, yaitu suatu perjanjian utang jangka panjang. Rasio *leverage* adalah rasio tingkat hutang perusahaan yang digunakan untuk membiayai asset dengan maksud memperbesar perusahaan perusahaan tersebut dan menjadi pengukur keamanaan para kreditur, seperti bank atau lembaga pemberi pinjaman, untuk mengambil keputusan memberi

pinjaman atau tidak. Menurut Sari dan Adhariani (2009), pembatas dari *debt covenant hypothesis* adalah *debt/equity hypothesis* yang dapat dijelaskan dengan menggunakan rasio *leverage*. Hipotesis tersebut dapat memprediksi manajer akan meningkatkan laba dan aset atau memilih prosedur akuntansi yang optimis. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar kontrak utangnya dan menghindari perusahaan dari biaya renegoisasi kontrak utang.

Menurut Lo (2006) kreditur mempunyai suatu hak dalam mengetahui dan mengawasi kegiatan operasional perusahaan jika perusahaan yang bersangkutan mempunyai nilai hutang yang cukup tinggi. Dengan situasi seperti itu, asimetri informasi yang terjadi antara kreditor dan manajemen dapat berkurang dan manajer tidak dapat melaporkan nilai laba secara *overstatement*. Alasan utamanya adalah kreditur akan meminta manajer melakukan diterapkannya metode akuntansi konservatif dalam laporan keuangan perusahaan tersebut, karena kreditur dapat terlindungi dengan adanya metode konservatif.

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), manajer memiliki kecenderungan untuk mengurangi nilai laporan laba untuk menghindari pengeluaran biaya politis yang besar. Ini disebabkan karena pemerintah menggunakan informasi berbasis akuntansi dalam proses pengalihan kekayaan perusahaan untuk kepentingan publik. Menurut Belkaoui dan Karpik (1989), biaya politis sering diproksikan dengan ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dengan melihat beberapa hal, salah satunya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan juga salah satu indikator untuk mengamati biaya politis yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Bahaudin dan Wijayanti (2011), ada tiga kategori ukuran perusahaan yaitu perusahaan besar (*large size*), perusahaan menengah (*medium size*) serta perusahaan kecil (*small size*). Deviyanti (2012) menyatakan perusahaan yang masuk dalam kategori besar memiliki sistem yang lebih kompleks serta profit yang lebih tinggi, hal tersebut membuat perusahaan juga menghadapi risiko yang lebih besar. Selain itu, perusahaan yang besar juga dihadapkan dengan besarnya biaya politis yang tinggi, sehingga perusahaan besar cenderung menggunakan prinsip akuntansi yang dapat mengurangi nilai laporan laba untuk mengurangi besarnya biaya politis.

Menurut Deviyanti (2012), pemerintah selaku penentu kebijakan akan lebih mengawasi perusahaan yang besar, salah satu kebijakannya adalah pajak. Semakin besar tingkat pendapatan atau penjualan perusahaan membuat semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Hal tersebut membuat pemerintah akan mendorong perusahaan untuk membayar pajak yang tinggi seiring dengan laba tinggi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan meminta perusahaan untuk memberikan pelayanan publik dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi kepada masyarakat. Lain hal nya dengan perusahaan yang termasuk dalam kategori perusahaan kecil. Perusahaan yang masuk dalam kategori ini lebih memilih meningkatkan nilai laba dalam melakukan pelaporan laba nya. Hal ini

didasari dari jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan kecil tidak sebesar perusahaan besar dan perusahaan kecil juga tidak terlalu menjadi sorotan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah tidak mewajibkan perusahaan kecil memberikan pelayanan publik dan tanggung jawab social yang tinggi kepada masyarakat.

2.1.6 Struktur Kepemilikan Manajerial

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (komisaris, direksi, dan karyawan) atau dengan kata lain manajemen tersebut sekaligus sebagai pemegang saham. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Oktadella (2011) menyatakan manajemen lain yang dapat memiliki saham dan dapat secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yaitu komisaris, direksi dan karyawan. Susiana dan Herawaty (2007) berpendapat bahwa kepemilikan oleh manajemen merupakan suatu mekanisme agar pihak pengelola melakukan aktivitas untuk kepentingan perusahaan, karena adanya kepemilikan manajemen pribadi dalam kepemilikan saham perusahaan.

Terdapat perbedaan antara perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi dengan kepemilikan manajerial yang rendah atau bahkan tanpa kepemilikan manajerial. Pada perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang tinggi, keputusan dan aktivitas akan diselaraskan oleh kepentingan manajemen yang sekaligus menjadi pemegang saham perusahaan tersebut. Karena semakin tinggi

kepemilikan manajerial, maka manajemen bukan hanya sekedar menjadi agen, namun juga menjadi pemilik perusahaan dan hal ini dapat mengurangi konflik agensi. Kepemilikan manajerial ini juga dapat membuat manajemen tidak melaporkan laba secara *overstatement*, karena rasa kepemilikan manajemen terhadap perusahaan. Selain itu, motif bonus atau manajemen laba dengan cara *income maximation* yang ingin dilakukan majemen juga berkurang, oleh karena itu pelaporan laba cenderung rendah. Hal ini dilakukan atas dasar manajemen ingin memperbesar perusahaan dengan menggunakan cadangan dana tersembunyi hasil dari pelaporan laba yang tidak *overstatement*. Dengan begitu, adanya peningkatan nilai perusahaan tersebut dapat membuat calon investor dan investor menilai perusahaan secara positif lalu akan menanamkan investasi di perusahaan tersebut.

Berbeda dengan perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial yang rendah atau bahkan tanpa kepemilikan manajerial, manajemen akan berlaku sesuai kepentingannya sebagai agen dalam perusahaan dan bukan pemegang saham. Kondisi seperti ini pelaporan laba akan mengalami *overstatement* karena manajer akan mengejar bonus dari laba yang dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan *plan bonus hypothesis*, yaitu manajemen akan meningkatkan laba dengan metode yang ada demi tercapainya bonus yang akan diperoleh. Dengan demikian kinerja manajemen terlihat baik oleh pemilik atau pemegang saham yang berharap mendapatkan dividen maupun *capital gain* yang tinggi atas laba yang telah dihasilkan perusahaan. Hasilnya, perusahaan akan melaporkan laba dengan nilai yang tinggi namun bukan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

2.1.7 Struktur Kepemilikan Institusional

Struktur keprmilikan institusional merupakan persentase jumlah saham yang di miliki oleh pihak institusional dari seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Budiono (2005) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mngendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba.

Jika investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah besar, maka mempunyai hak untuk mengawasi prilaku dan kinerja manajemen. Akan tetapi, investor cenderung berharap investasi yang mereka tanamkan di dalam perusahaan mempunyai tingkat return yangg tinggi. Hal ini mendorong manajemen untuk melaporkan laba yang tidak konservatif agar pembagian deviden tinggi. Selain itu juga menerik para alon investor baru untuk menanamkan investasinya.

2.1.8 Telaah Penelitian Terdahulu

Mayangsari dan Wilopo (2002) melakukan penelitian dengan variable konservatisme, manajemen laba, kontrak hutang, *political cost*, kompensasi manajer. Alat uji yang digunakan adalah regresi dan korelasi dengan 90 sampel perusahaan. Hasil dari analisis ini adalah nilai pasar perusahaan mempengaruhi tingkat konservatisme yang diterapkan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Widya (2004) menggunakan variable independen struktur kepemilikan, kontrak utang, kos politis dan kesempatan tumbuh. Alat uji yang digunakan adalah regresi logit dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Hasil dari analisis ini adalah semakin sering

perusahaan memutuskan perjanjian utang maka perusahaan cenderung memilih strategi akuntansi yang kurang konservatif.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Almilia (2005) dengan menggunakan variabel independen *size* perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, rasio konsentrasi, *debt to total asset ratio*, menghasilkan bahwa semakin kecil *size* perusahaan maka laporan keuangan yang disajikan cenderung konservatif. Lalu hasil lainnya adalah semakin tinggi *debt to total asset ratio* maka laporan keuangan semakin tidak konservatif (optimis).

Penelitian Widyaningrum (2008), yaitu meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, *leverage* dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi dengan metode analisis regresi logistic. Dengan menggunakan sampel penelitian sebanyak 64 perusahaan manufaktur yang listing di BEI menemukan hasil bahwa sebanyak 57% perusahaan menerapkan konservatisme dan sebanyak 43% perusahaan tidak menerapkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, dan risiko litigasi juga berpengaruh sedangkan ukuran perusahaan yang merupakan variabel mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sari dan Adhariani (2009) dengan menggunakan variabel independen *debt/equity hypothesis* (yang diproksi oleh tingkat *leverage*), dan *size hypothesis* (ukuran perusahaan, risiko perusahaan, rasio

konsentrasi, dan intensitas modal). Pengukuran konservatisme menggunakan dua perhitungan, yaitu NOA (*non-operating accrual*) dan DACC (*discretionary accrual*). Alat uji nya meliputi regresi linier berganda dengan 370 sampel perusahaan. Hasil penelitian ini adanya hubungan negatif antara rasio *leverage* dengan konservatisme akuntansi dengan menggunakan kedua pengukuran. Kemudian pada pengukuran NOA diperoleh variable ukuran perusahaan dan intensitas modal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap konservatisme. Sedangkan pada pengukuran DACC diperoleh variabel ukuran perusahaan dan rasio konsentrasi memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap konservatisme.

Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ardina (2012) yang menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, *leverage*, *firm size*, *operating cash flow* sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi. Lalu hasil lainnya adalah kepemilikan public, *leverage*, dan *operating cash flow* berperngaruh positif terhadap konservatisme akuntansi.

Berikut ini adalah ringkasan dari pemaparan di atas yang berkaitan dengan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi:

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Independen	Hasil Penelitian
1.	Sekar Mayang sari dan (2002)	Konservatisme Akuntansi, *Value Relevan dan Discretionary Accruals* Implikasi Empiris *Model Feltham Ohlson* (1996)	Manajemen Laba,Kontrak Hutang,*Political Cost*, Kompensasi Manajer	Nilai pasar perusahaan mempengaruhi tingkat konservatisme yang diterapkan di suatu perusahaan.
2.	Widya (2004)	Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pilihan Perusahaan terhadap Akuntansi Konservatif	Struktur Kepemilikan, *Debt Covenant, Political Cost, Growth Opportunities*	Semakin sering perusahaan memutuskan perjanjian utang , maka perusahaan cenderung memilih strategi akuntansi yang kurang konservatif.
3.	Luciana Spica Almilia (2005)	Pengujian *Size Hypothesis* dan *Debt Equity Hypothesis* yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan dengan Teknik Analisis Multinominal Logit	*Size* Perusahaan, Risiko Perusahaan, Intensitas Modal, Rasio Konsentrasi, *Debt to Total Aset Ratio*	Semakin kecil *size* perusahaan, maka laporan keuangan yang disajikan cenderung konservatif.. Semakin tinggi *debt to total asset ratio,* maka laporan keuangan semakin tidak konservatif atau optimis.
4.	Widyaningrum (2008)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, *leverage*, dan Risiko Litigasi	Kepemilikan Manajerial, *Leverage*, Risiko Litigasi	Kepemilikan manajerial berpengaruh seccara positif seccara signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Laverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi Resiko ligitasi berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Variabel berubah ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme
5.	Cynthia Sari dan Desi Adhariani (2009)	Konservatisme Perusahaan di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya	Rasio Leverage, Ukuran perusahaan, Risiko Perusahaan, Intensitas Modal, Rasio Konsentrasi Industri	Leverage tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang di ukur dengan nonoperating dan *discretionary accural*. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan

				signifikan terhadap konservatisme akuntansi yang diukur dengan *nonoperating* dan *discretionary*. Risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi yang diukur dengan *nonoperating* dan *dsicretionary accural*. Intensitas modal berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi dengan pengukuran *nonoperating accural*. Rasio konsenterasi industri berhubungan positif dengan konservatisme akuntansi yang diukur dengan *discretionary accural*.
6.	Angga Alfian (2013)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemilihan Konservatisme Akuntansi	Hanya variabel rasio leverage, intensitas modal dan kesempatan tumbuh yang menunjukan hasil berpengaruh signifikan terhadap pemilihan konservatisme akuntansi. Sedangkan Ukuran Perusahaan, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap pemilihan konservatisme akuntansi
7.	Deva Agung Nugroho (2012)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, *Debt Covenant*, Tingkat Kesulitan Keuangan Perusahaan, dan Risiko Litigasi terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008- 2010)	Risiko Litigasi, tingkat kesulitan, debt convenant, kepemilikan manaherial	Risiko litigasi berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Tingkat kesulitan perusahaan berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi Debt convenant berpengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi

Penelitian ini menggunakan acuan jurnal penelitian milik Sari dan Adhariani (2009). Dan menambahkan tiga variabel struktur kepemilikan. Yaitu Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Publik, dan Struktur kepemilikan Institusional. Ada pula perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Sari dan Adhariani (2009), yaitu periode penelitian ini menggunakan periode laporan keuangan yang terbaru, yaitu 2010, 2011, 2012 dan 2013. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan penggunaan konservatisme akuntansi pada laporan keuangan.

2.3 Model Penelitian

Adapun model penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

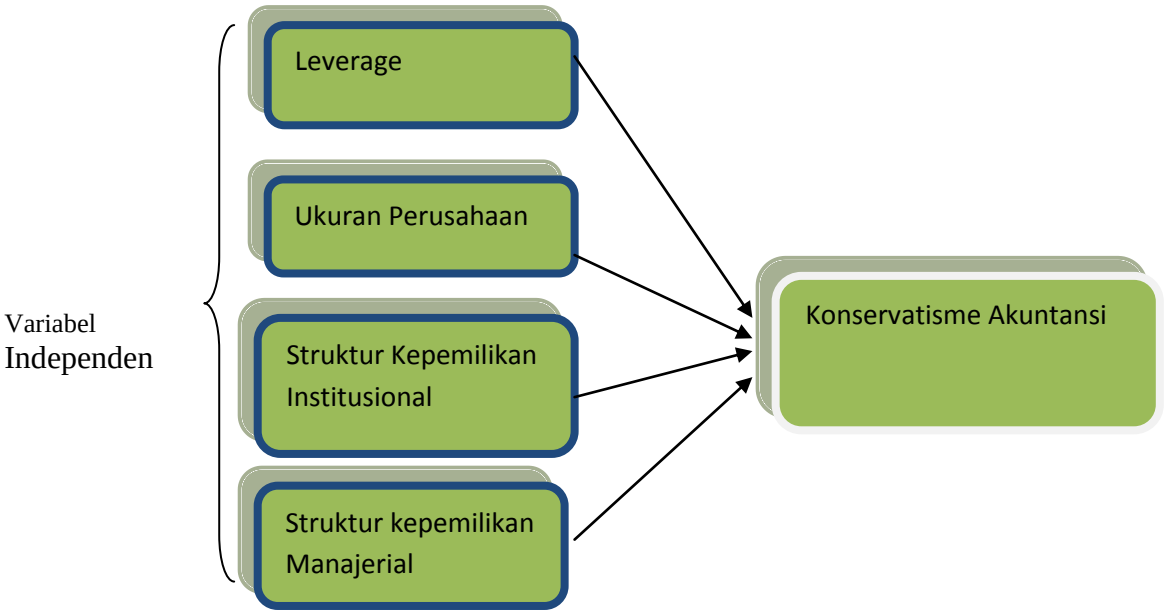

Beberapa faktor-faktor tersebut adalah rasio *leverage* menunjukan seberapa besar aset yang di gunakan untuk menjalankan kegiatan oprasioanal perusahaan dibiayai oleh utang dari pihak eksternal perusahaan. Apabila perushaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka perusahaan akan semakin menerapkan prinsip yang konservatif. Ukuran perusahaan yang di miliki perusahaan mempunyai ukuran yang besar akan semakin menerapkan prinsip konservatif. Hal ini di karenakan perusahaan akan lebih di soroti pemerintah dan publik, sehingga untuk mengurangi perhatian tersebut perusahaan menyajikan laba yang tidak berkebihan. Struktur kepemilikan yang tinggi dibanding dengan pihak eksternal perusahaan, menyebabkan perushahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang konservatif. Hal ini di karenakan manajer sebenarnya tidak hanya mementingkan bahwa manajer juga ingin memperbesar perusahaan. Beda dengan struktur kepemilikan manajerial, apabila perushaan mempunyai persentase kepemilikan institusional dan publik yang itnggi justru akan membuat perusahaan untuk menerapkan prinsip yang kurang konsevatif. Hal ini di karenakan pihak-pihak tersebut hanya berharap return berupa deviden atau capital gain dari perusahaan yang akan tercermin dari laba yang tinggi Lebih lanjut, bila perusahaan melaporkan laba yang kurang konservatif, maka akan dapat menarik calon investor baru untuk menanamkan modal ke perusahaan. Faktor-faktor tersebut merupakan variable independen dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Rasio *Leverage* terhadap Konservatisme

Leverage menunjukan seberapa besar aset perusahaan yang di biayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat kemanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor, maka kreditor secara optimis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan yang di harapkan dapat mengahsilkan keuntungan.

Lo (2006) menyatakan jika perusahaan mempunyai hutang yang itnggi, maka kreditor juga mempunyai hak untuk mengetahui dan mengawasi jalannya kegiatan oprasional perusahaan. Dengan demikian asimetri informasi antara kreditor dan perusahaan berkurang karena manajer tidak dapat menyembunyikan informasi keuangan yang mungkin akan di manipulasi atau melebih-lebihkan aset yang di miliki. Semakin tinggi tingkat Levervage, makan semakinbesar kemungkinan konflik yang akan muncul antara pemegang saham dan pemegang obligasi yang pada akhirnya mempengaruhi permintaan kontraktual terhadap akuntansi yang konservatis (Ahmed dan Duellman, 2006).

H1: Rasio *leverage* berpengaruh secara positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi

2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Konservatisme

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indicator untuk mengamati besar biaya politis yang harus ditanggung. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Seperti yang dikatakan oleh Kartini dan Arianti (2008), ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Bahaudin dan Wijayanti (2011), ada tiga kategori ukuran perusahaan yaitu perusahaan besar (*large size*), perusahaan menengah (*medium size*) serta perusahaan kecil (*small size*). Watss dan Zimmerman (1990) berpendapat bahwa *political cost hypothesis* dapat memerediksikan bahwa perusahaan besar lebih sensitif terkait dengan biaya politis. Hal ini terkait atas dorongan pemerintah, yang menjadi pembuat kebijakan di negara yang bersangkutan, untuk pemabayaran biaya politis. Maka untuk mengurangi pembayaran biaya politis tersebut perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara konservatif. Ini didasari atas pernyataan Jensen dan Meckling (1976) serta Watts dan Zimmerman (1978) yang menyatakan bahwa biaya politis akan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan.

Pelaporan secara konservatisme pada laporan keuangan dilakukan karena pemerintah menggunakan informasi akuntansi dalam pengalihan kekayaan perusahaan. Scott (2007) juga menyatakan bahwa jika perusahaan menghadapi biaya politis yang

semakin besar, maka manajer semakin cenderung pada pemilihan prosedur akuntansi yang menurunkan nilai laba atau konservatif. Pajak merupakan salah satu biaya politis yang selalu dihadapi perusahaan, oleh karena itu untuk menghindari tingginya pajak, manajemen akan cenderung untuk melaporkan laba yang rendah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Sari dan Adhariani (2009) yang menyebutkan bahwa untuk menghindari biaya politis maka akan dilakukan pelaporan laba yang konservatif. Dari hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi

2.4.3 Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial terhadap Konservatisme

Menurut Alfina (2006), *plan bonus hypothesis* dalam *possitive accounting theory* menyatakan bahwa manajer akan bertindak seiring dengan bonus yang diberikan. Jika target laba perusahaan tercapai, maka bonus akan diberikan kepada manajemen perusahaan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Dengan begitu pelaporan perusahaan akan kurang konservatif dikarenakan manajemen laba yang mungkin dilakukan manajemen perusahaan demi mendaptkan bonus.

Namun jika kepemilikan manajer lebih banyak dibanding para investor lain, maka manajemen cenderung melaporkan laba lebih konservatif. Karena rasa memiliki manajer terhadap perusahaan itu cukup besar, maka manajer lebih berkeinginan untuk mengembangkan dan memperbesar perusahaan daripada

mementingkan bonus yang didapat jika memenuhi target laba. Dengan metode konservatif, maka akan terdapat cadangan tersembunyi yang cukup besar untuk meningkatkan jumlah investasi perusahaan. Aset diakui dengan nilai terendah, ini berarti nilai pasar lebih besar dari pada nilai buku. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa pasar dan investor akan menilai positif akan hal ini. Dari hasil uraian diatas, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H3: Struktur Kepemilikan manajerial berpengaruh secara positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi

2.4.4 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional terhadap Konservatisme

Fala (2008) menyatakan bahwa investor institusional mempunyai investasi ekuitas yang cukup besar sehingga investor institusional terdorong untuk mengawasi tindakan dan kinerja manajer lebih ketat. Jika investor institusional mempunyai kepemilikan saham dalam jumlah besar, maka mereka mempunyai hak untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajemen. Investor cenderung berharap investasi yang mereka tanamkan di dalam perusahaan aman dan mempunyai tingkat *return* yang tinggi. Hal ini mendorong manajemen untuk melaporkan laba yang tidak konservatif agar pembagian dividen tinggi. Selain itu juga menarik para calon investor baru untuk menanamkan investasinya. Lebih lanjut, Budiono (2005) menyatakan kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi

tindakan manajemen melakukan manajemen laba. Oleh karena itu, dibentuklah hipotesis sebagai berikut:

H4: Struktur kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap penerapan konservatisme dalam akuntansi.